

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS PEMASYARAKATAN
ATAS PEREDARAN NARKOTIKA OLEH NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

HARIYANTO

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mencari dan mengetahui alasan-alasan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sus sistem peradilan pidana dijadikan tempat peredaran narkotika. Selain itu, untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggung jawaban pidana oleh petugas pemasyarakatan yang turut serta melakukan peredaran narkotika dari lembaga pemasyarakatan. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong petugas pemasyarakatan turut serta melakukan peredaran narkotika. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*). Di samping itu, digunakan teori pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yakni bahwa dalam menganalisis permasalahan dalam keadaan nyata atau factual yang terjadi di lapangan khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana dapat dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika karena adanya peluang dan kesempatan yang diberikan oleh petugas ataupun Kepala Lapas yang memberikan fasilitas dalam mengadakan narkotika melalui permufakatan jahat secara terorganisir oleh narapidana dengan petugas maupun Kepala Lapas sehingga narkotika dapat beredar diperjualbelikan melalui tempat lembaga pemasyarakatan. Bentuk pertanggung jawaban pidana oleh petugas pemasyarakatan yang turut serta melakukan peredaran narkotika dari lembaga pemasyarakatan telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 114, Pasal 113 pelakunya dipidana dengan hukuman penjara dan membayar denda. Faktor pendorong yang mengakibatkan petugas pemasyarakatan turut serta melakukan peredaran narkotika dari lembaga pemasyarakatan karena adanya keuntungan melimpah yang dijanjikan yang akan diperoleh petugas pemasyarakatan dari hasil peredaran narkotika dari lembaga pemasyarakatan.

**CRIMINAL RESPONSIBILITIES OF COMMUNITY ASSEMBLY ON THE
CIRCULAR OF NARCOTICS BY THE PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL
IN COMMUNITY INSTITUTIONS**

HARIYANTO

ABSTRACT

This research was conducted to find out and find out the reasons for correctional institutions as part of the criminal justice system as a place for drug trafficking. In addition, to know and understand the form of criminal liability by correctional officers who participate in the distribution of narcotics from prisons. And to find out the factors that encourage correctional officers to participate in drug trafficking.

The theory used in this study is the theory of punishment, generally can be grouped in three major groups, namely absolute theory or vengeance theory (vergeltings theorien), relative theory or goal theory (doel theorien), and the theory of combining (verenigings theorien). In addition, the theory of criminal responsibility is used.

The research method used in this thesis is an empirical juridical approach, namely that in analyzing problems in real or factual conditions that occur in the field specifically in Cipinang Penitentiary.

The results of this study conclude that prisons as part of the criminal justice sub-system can be used as a place for drug trafficking because of the opportunities and opportunities provided by officers or Head of Prisons who provide facilities to administer narcotics through evil consensus organized by inmates with officers and Head of Prison so that narcotics can be circulated for sale through a prison facility. Forms of criminal liability by correctional officers who participated in the circulation of narcotics from correctional institutions have been regulated under Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics in article 114, Article 113 of those charged with imprisonment and paying fines. The driving factor that resulted in correctional officers participating in the distribution of narcotics from correctional institutions was because of the plentiful benefits promised by prison officials from the proceeds of drug trafficking from prisons.